

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Implementasi Program**

Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Jones dalam Arif Rohman (2009: 101-102) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Menurut Charles O. Jones (Siti Erna Latifi Suryana, 2009: 28) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu :

1. Pengorganisasian

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

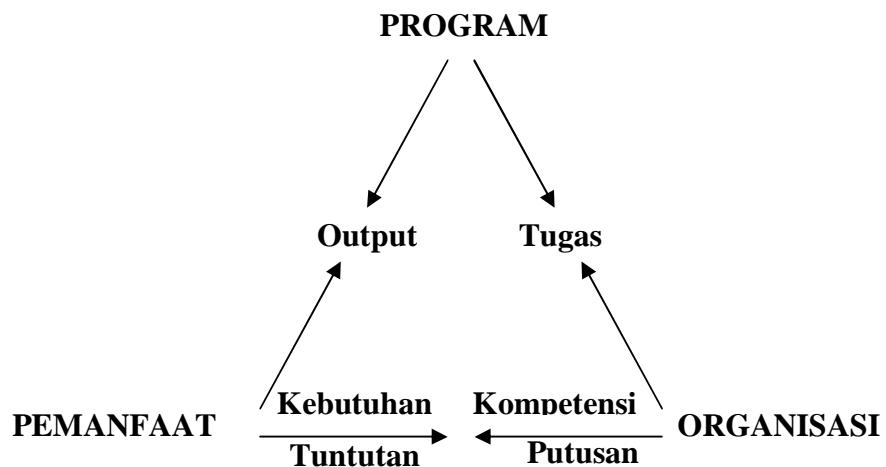
2. Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

3. Penerapan atau Aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten. Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Model kesesuaian Korten digambarkan sebagai berikut :



*Sumber: Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2000: 12)*

Gambar 1. Model Kesesuaian Implementasi Program

Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana,

yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program (*Haedar Akib dan Antonius Tarigan, 2000: 12*).

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan apabila *output* program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas *output* tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan *output* program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan *output* program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Terkait landasan dan mutu implementasi, menurut Islamy dalam buku Maryono (2010: 43) yang berjudul *Menakar Kebijakan RSBI: Analisis Kritis Studi Implementasi*, untuk bisa melihat apakah proses implementasi telah berjalan dengan baik ada kriteria yang perlu diperhatikan, beberapa diantaranya yakni :

1. Apakah unit pelaksana teknis telah disiapkan ?
2. Apakah pelaksana kebijakan telah mengerti akan rencana, tujuan, dan sasaran kebijakan ?

3. Apakah aktor-aktor utama telah ditetapkan dan siap menerima tanggung jawab pelaksanaan kebijakan tersebut ?
4. Apakah koordinasi pelaksanaan telah dilakukan dengan baik ?
5. Apakah hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab telah diberikan dan dipahami serta dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana kebijakan ?
6. Apakah kriteria penilaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan telah ada, jelas, dan diterapkan dengan baik?

Berbagai pertanyaan di atas dapat menjadi bahan dan pedoman dalam proses pencarian data di sekolah dalam upaya untuk mendeskripsikan pelaksanaan program Evaluasi Diri Sekolah (EDS) di SMP Negeri 2 Tempel. Kesimpulannya program merupakan interpretasi dari sebuah kebijakan pemerintah yang berisi kumpulan instruksi, yang dibuat untuk memperbaiki permasalahan yang sedang berkembang. Program harus ada dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Program pemerintah yang menjadi fokus kajian penelitian ini yakni program Evaluasi Diri sekolah (EDS) yang merupakan salah satu komponen dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

## **B. Kebijakan Pendidikan**

### **1. Konsep Kebijakan Pendidikan**

Arif Rohman (2009: 129) mengungkapkan kebijakan pendidikan merupakan keputusan berupa pedoman bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah

tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan. Kebijakan pendidikan diambil dan dirumuskan disebabkan karena adanya masalah dalam dunia pendidikan. Pada umumnya lima masalah yang dihadapi dunia pendidikan adalah: (a) pemerataan; (b) daya tampung; (c) relevansi; (d) kualitas; dan (d) efisiensi dan efektivitas pendidikan.

Ensiklopedia Wikipedia (Riant Nugroho, 2008: 36) menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho (2008: 141-155) menyebutkan ada beberapa aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan, yakni :

- a. Kebijakan pendidikan bagian dari kebijakan publik yang merupakan penjabaran dari visi dan misi dalam masyarakat.
- b. Kebijakan pendidikan meliputi proses analisis dan perumusan kebijakan, pelaksanaan serta evaluasi.
- c. Kebijakan pendidikan haruslah mempunyai validitas dalam perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan.
- d. Kebijakan pendidikan perlu keterbukaan sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat.
- e. Kebijakan pendidikan didukung oleh riset dan pengembangan.
- f. Kebijakan pendidikan ditujukan kepada kebutuhan peserta didik.

- g. Kebijakan pendidikan diarahkan pada terbentuknya masyarakat demokratis.
- h. Kebijakan pendidikan berkaitan dengan penjabaran misi pendidikan dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu.
- i. Kebijakan pendidikan harus berdasarkan efisiensi dan bukan berdasarkan pada kekuasaan, intuisi ataupun kepuasan birokrat.
- j. Kejelasan tujuan akan melahirkan kebijakan pendidikan yang tepat

Carter V. Good berpandangan bahwa kebijakan pendidikan merupakan suatu penilaian terhadap sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasional, yang dioperasikan dalam sebuah lembaga sebagai perencanaan umum. Tujuannya sebagai panduan dalam mengambil keputusan agar tujuan pendidikan yang diinginkan bisa dicapai (Ikmsatu. 2007.[http://ikmsatu.multiply.com/journal/item/2/Karakter\\_Kebijakan\\_Pendidikan\\_Nasional](http://ikmsatu.multiply.com/journal/item/2/Karakter_Kebijakan_Pendidikan_Nasional)).

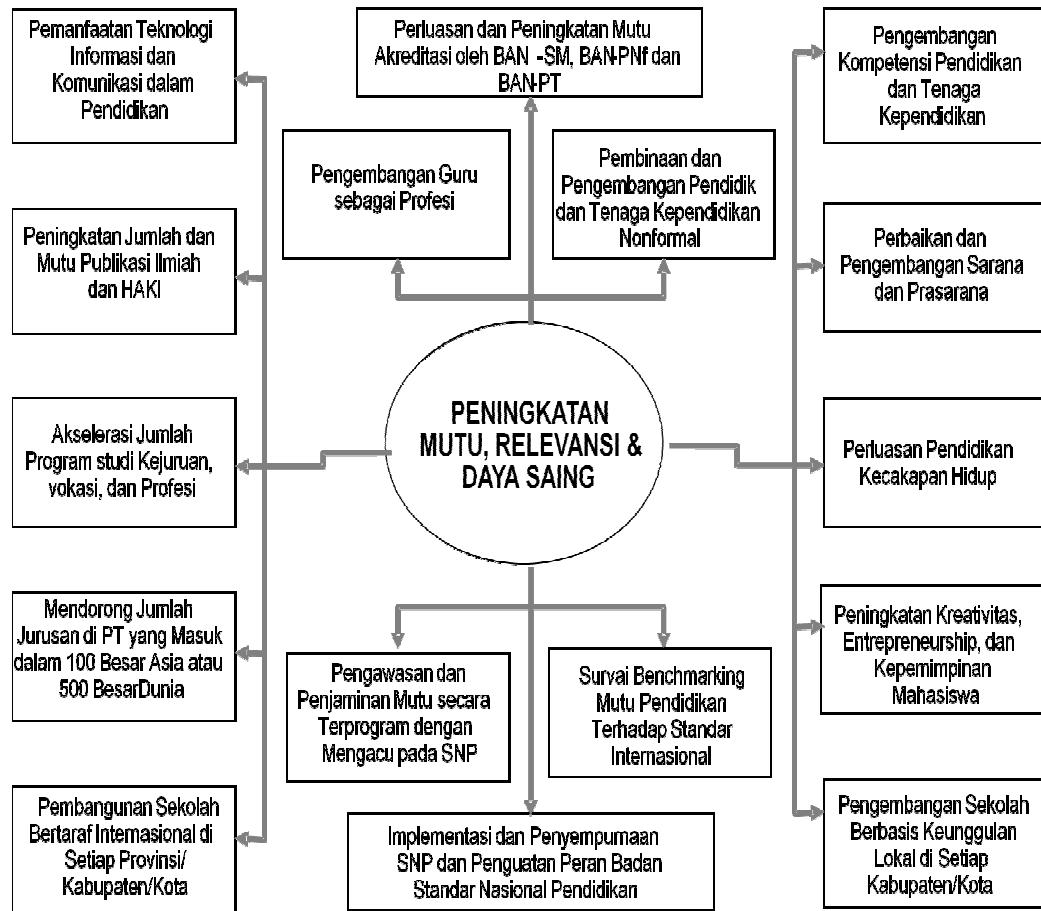
Kesimpulan yang dapat ditarik dari pandangan para ahli di atas yakni kebijakan pendidikan merupakan berbagai keputusan yang dibuat sebagai pedoman dalam mengelola dan mengatur segala proses penyelenggaraan di bidang pendidikan baik sektor makro maupun mikro (sekolah) dengan dasar peraturan perundang-undangan sehingga dapat memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh.

## **2. Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Panjang Departemen Pendidikan Nasional**

Rencana pembangunan pendidikan jangka panjang dimaksudkan sebagai pedoman bagi penentuan penekanan pelaksanaan kebijakan pembangunan pendidikan nasional jangka menengah, dalam memastikan tercapainya visi dan misi departemen dengan penurunan program kerja yang realistik, terintegrasi, dan berkesinambungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, Departemen Pendidikan Nasional membuat empat tema strategis pembangunan pendidikan yaitu: (1) peningkatan kapasitas dan modernisasi; (2) penguatan pelayanan; (3) daya saing regional; dan (4) daya saing internasional.

Setiap tema strategis pembangunan pendidikan jangka panjang di atas, akan diturunkan dalam program kerja Departemen Pendidikan Nasional sesuai kebijakan pembangunan jangka menengah yang menekankan pada 3 tantangan utama, yaitu: (1) pemerataan dan perluasan akses; (2) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; dan (3) peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik.

Dalam upaya peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan mulai dari kebijakan yang sifatnya makro sampai dengan mikro. Beberapa kebijakan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Sumber : LPMP D.I.Y 2011

Gambar 2. Kebijakan dalam Peningkatan Mutu, Relevansi & Daya Saing

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa salah satu upaya dalam peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan yakni dengan melakukan pengawasan dan penjaminan mutu secara terprogram. Acuan dalam pelaksanaannya yaitu delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) mulai dari standar kelulusan, isi, proses, sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan, pembiayaan, dan standar penilaian.

### **3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan**

Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2009 telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 63 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). Peraturan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan satu sistem penjaminan mutu pendidikan yang sekaligus juga akan menjadi dasar pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan sehingga akan tercipta budaya peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan.

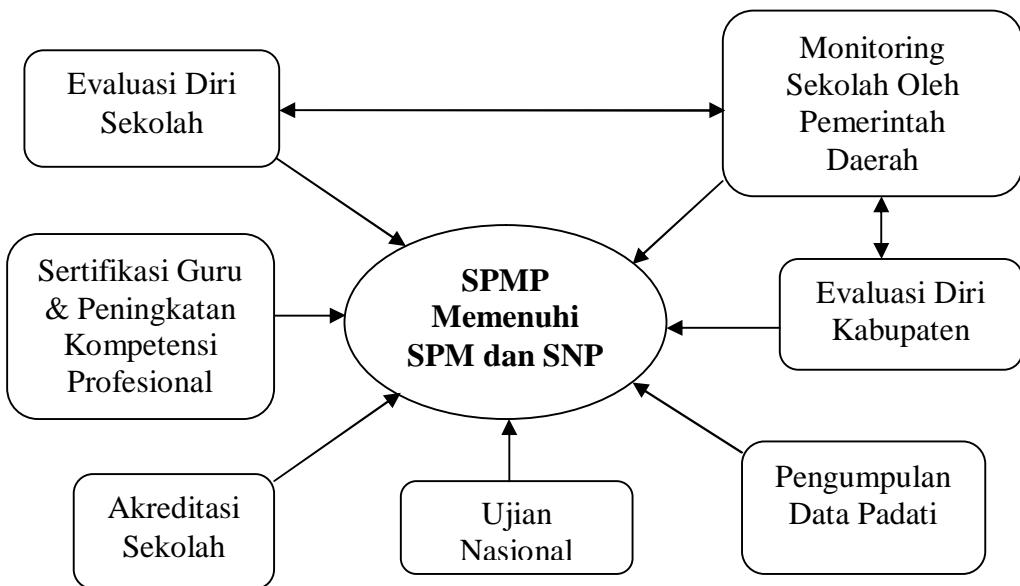
Mutu adalah kesesuaian fungsi dengan tujuan, kesesuaian dengan spesifikasi dan standar yang ditentukan/berlaku, sesuai dengan kegunaannya, produk yang memuaskan pelanggan, sifat dan karakteristik produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan/harapan pelanggan (ISO 9000). Penjaminan Mutu (*quality assurance*) adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan.

Dalam Permendiknas Nomor 63 tahun 2009, penjaminan mutu didefinisikan sebagai kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Secara singkat, implementasi SPMP terdiri dari rangkaian proses/tahapan yang dimulai dari (1) pengumpulan data; (2) analisis data; (3) pelaporan/pemetaan; (4)

penyusunan rekomendasi; dan (5) upaya pelaksanaan rekomendasi dalam bentuk program peningkatan mutu pendidikan.

Tahapan-tahapan proses SPMP ini merupakan suatu siklus yang saling terkait dan berlangsung secara *sustainable* (berkelanjutan). Pelaksanaan tahapan-tahapan di atas perlu dilaksanakan secara kolaboratif oleh berbagai *stakeholders* sekolah sesuai dengan amanat managemen berbasis sekolah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.

SPMP terdiri dari beberapa komponen pendukung sumber data yang digunakan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar Pelayanan Minimal di dalam Permendiknas Nomor 63 tahun 2009 didefinisikan sebagai jenis dan tingkat pelayanan minimal yang harus disediakan oleh satuan atau program pendidikan, pemerintah kota, kabupaten dan propinsi. Sedangkan Standar Nasional Pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 didefinisikan sebagai kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk komponen SPMP dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



*Sumber : Panduan Teknis Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah*

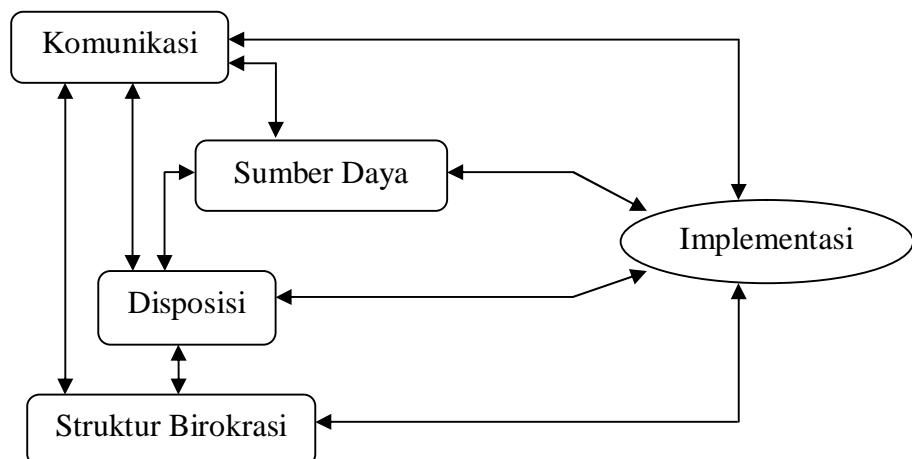
Gambar 3. Komponen Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Dari gambar di atas, diketahui bahwa salah satu komponen dalam SPMP adalah Evaluasi Diri Sekolah. Evaluasi Diri Sekolah menjadi komponen utama dalam SPMP karena pelaksanaannya melibatkan seluruh unsur yang ada di sekolah. SPMP tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa keterlibatan dan pemberdayaan berbagai *stakeholders* sekolah, termasuk wakil pemerintah. Melalui EDS, sekolah dapat melaksanakan program manajemen yang berbasis data. Pola manajemen ini pada kenyataannya masih belum dilakukan oleh banyak sekolah sebagai suatu budaya kerja. Hujair AH. Sanaky (2011) menyebutkan data yang valid, secara empirik dan akurat akan selalu menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan dan penyusunan berbagai rencana peningkatan mutu pendidikan di sekolah/madrasah.

#### 4. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan

Tolok ukur keberhasilan suatu kebijakan berada pada tahap implementasi atau pelaksanaannya. Pelaksanaan kebijakan lebih bersifat kegiatan praktis termasuk di dalamnya mengeksekusi dan mengarahkan. Tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan akan dipengaruhi berbagai unsur, baik yang bersifat mendukung maupun menghambat, termasuk di dalamnya unsur lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Hal yang perlu diwaspadai yaitu dalam memilih alternatif untuk memecahkan masalah sehingga tidak mengganggu pencapaian tujuan pendidikan.

Berdasarkan teori George C. Edwards III (AG. Subarsono, 2008: 90-92), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu :



*Sumber: AG. Subarsono (2008: 91)*

Gambar 4. Model Implementasi Kebijakan George Edward III

##### a. Komunikasi

Proses komunikasi efektif diperlukan dalam kerangka pelaksanaan kebijakan. Pimpinan harus mengkomunikasikan kebijakan yang akan dilaksanakan kepada bidang yang bertanggung jawab agar dapat

memahami maksud dan tujuan kebijakan. Komunikasi adalah perekat organisasi dan koordinasi adalah asal muasal dari kerja sama tim serta terbentuknya sinergi dan integrasi. Komunikasi antar komponen pelaksana EDS perlu dilakukan secara intensif agar kinerjanya dapat optimal.

b. Sumber Daya

Betapapun jelasnya proses komunikasi kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan betapapun perintah dan kewenangan sudah diberikan tetapi kalau sumber daya yang tersedia tidak mendukung hal ini dapat menghambat pelaksana kebijakan. Adapun pentingnya masalah sumber daya dalam pelaksanaan EDS mencakup: jumlah guru yang dilibatkan, keahlian guru yang diperlukan, informasi dari kepala sekolah dan pengawas dan berbagai penyesuaian lainnya.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap yang dimaksud adalah sikap pelaksana kebijakan dalam hal ini pelaksana program EDS. Hal ini terkait dengan adanya sikap yang kuat bagi pelaksana yang memiliki kapasitas dalam melaksanakan program. Komponen pelaksana program perlu sepenuh hati dan memiliki komitmen dalam melaksanakan fungsinya sehingga akan menghasilkan pandangan yang seimbang bahwa program dilaksanakan untuk pengembangan diri dan sekolah ke arah yang lebih baik.

d. Struktur Birokrasi

Dalam pelaksanaan kebijakan melibatkan banyak orang, bidang dan lingkungan sehingga dapat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan kebijakan. Masalah koordinasi antar struktur birokrasi dapat menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan. Untuk itu diperlukan sebuah prosedur tetap atau *standard operasional procedure* (SOP) untuk kelancaran kebijakan.

Solichin Abdul Wahab (Yoyon Bahtiar Irianto, 2011: 42) mengemukakan faktor-faktor yang menyebabkan berhasil tidaknya suatu kebijakan antara lain:

- a. Kompleksitas kebijakan yang telah dirumuskan.
- b. Kejelasan rumusan masalah dan alternatif pemecahan masalah.
- c. Sumber-sumber potensial yang mendukung.
- d. Keahlian pelaksana kebijakan.
- e. Dukungan dari khalayak sasaran.
- f. Efektivitas dan efisiensi birokrasi.

Arif Rohman (2009: 147-149) membagi sumber kegagalan dan keberhasilan dari implementasi kebijakan ke dalam tiga faktor yaitu :

- a. Faktor yang terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan, terkait dengan rumusan kalimatnya jelas atau tidak, tujuan dan sasarannya tepat atau tidak, serta mudah dipahami dan diinterpretasikan atau tidak.

- b. Faktor yang terletak pada personil pelaksana yaitu terkait dengan tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan, serta kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksana kebijakan tersebut.
- c. Faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana yakni menyangkut jaringan sistem, hierarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main organisasi, terget masing-masing tahap yang ditetapkan, model monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi yang dipilih

## **C. Program Evaluasi Diri Sekolah (EDS)**

### **1. Konsep Evaluasi Diri Sekolah**

Di dalam panduan teknis Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah, disebutkan bahwa Evaluasi Diri Sekolah (EDS) adalah proses evaluasi yang bersifat internal yang melibatkan pemangku kepentingan untuk melihat kinerja sekolah berdasarkan SPM dan SNP yang hasilnya dipakai sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan sebagai masukan bagi perencanaan investasi pendidikan tingkat kabupaten/kota. Evaluasi diri merupakan suatu upaya sistematis untuk menghimpun, mengolah dan menyusun informasi sebagai aspek kegiatan akademis-profesional untuk dapat menyimpulkan kinerja sekolah. Evaluasi diri sekaligus menjadi umpan balik guna meningkatkan kinerja sekolah.

Dalam evaluasi diri dilakukan analisis tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

EDS di sekolah diperlukan sebab sampai sekarang belum ada satupun alat yang dapat dipakai oleh sekolah untuk memberikan gambaran umum dalam aspek SPM dan 8 SNP secara nyata, akurat dan berdasarkan bukti-bukti tentang seluruh kinerja sekolah sebagai dasar untuk membuat RPS/RKS dan peningkatan mutu profesional seluruh pemangku kepentingan sekolah.

Walaupun sudah ada beberapa upaya evaluasi di sekolah, namun sifatnya *eksternal* karena dilakukan oleh pihak luar. Dengan demikian kehadiran EDS sangat diperlukan karena evaluasi ini adalah evaluasi *internal* yang dilakukan oleh dan untuk sekolah sendiri guna mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, semacam cermin muka yang kemudian dipakai sebagai dasar dalam upaya memperbaiki kinerja sekolah.

Hasil EDS juga dapat dipakai oleh pengawas untuk laporan kepada pihak Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag kabupaten/kota melalui kegiatan Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah (MSPD) sebagai masukan untuk dasar perencanaan peningkatan mutu pendidikan dan dasar pemberian bantuan ke sekolah-sekolah. EDS bukanlah proses yang birokratis atau mekanis, melainkan suatu proses dinamis yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam sekolah. EDS perlu

dikaitkan dengan proses perencanaan sekolah dan dipandang sebagai bagian yang penting dalam kinerja siklus pengembangan sekolah.

Proses EDS merupakan siklus, yang dimulai dengan pembentukan Tim Pengembang Sekolah (TPS), pelatihan penggunaan instrumen, pelaksanaan EDS di sekolah dan penggunaan hasilnya sebagai dasar penyusunan RPS/RKS dan RKAS. Sekolah melakukan proses EDS setiap setahun sekali. EDS dilaksanakan oleh Tim Pengembang Sekolah (TPS) yang terdiri atas: kepala sekolah, wakil unsur guru, wakil komite sekolah, wakil orang tua siswa, dan pengawas.

TPS mengumpulkan bukti dan informasi dari berbagai sumber untuk menilai kinerja sekolah berdasarkan indikator-indikator yang dirumuskan dalam instrumen. Dengan menggunakan instrumen EDS, sekolah dapat mengukur dampak kinerjanya terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Sekolah juga dapat memeriksa hasil dan tindak lanjutnya terhadap perbaikan layanan pembelajaran yang diberikan dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran peserta didik. Kegiatan ini melibatkan semua pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah untuk memperoleh informasi dan pendapat dari seluruh pemangku kepentingan sekolah.

Tujuan utama Evaluasi Diri Sekolah (EDS) adalah:

- a. Sekolah menilai kinerjanya berdasarkan SPM dan SNP.
- b. Sekolah mengetahui tahapan pengembangan dalam pencapaian SPM dan SNP sebagai dasar peningkatan mutu pendidikan yang bermuara pada peningkatan mutu peserta didik.

- c. Sekolah dapat menyusun Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) atau Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) sesuai kebutuhan nyata menuju ketercapaian implementasi SPM dan SNP.

## **2. Landasan Hukum Pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah**

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
- f. Peraturan lain yang relevan dengan implementasi delapan Standar Nasional Pendidikan.

## **3. Manfaat Evaluasi Diri Sekolah**

EDS diharapkan dapat memberikan sumbangan penting bagi sekolah sendiri dan bagi pemerintahan kabupaten/kota yang memiliki kewenangan mengelola pendidikan. Berikut adalah manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan EDS.

a. Bagi sekolah

- 1) Sekolah dapat mengidentifikasi kelebihan serta kekurangannya dan merencanakan pengembangan ke depan.
- 2) Sekolah dapat memiliki data dasar yang akurat sebagai dasar untuk pengembangan dan peningkatan di masa mendatang.
- 3) Sekolah dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan mutu pendidikan yang disediakan, mengkaji apakah inisiatif peningkatan tersebut berjalan dengan baik dan menyesuaikan program sesuai dengan hasilnya.
- 4) Sekolah dapat memberikan laporan formal kepada pemangku kepentingan demi meningkatkan akuntabilitas sekolah.

b. Bagi tingkatan lain dalam sistem (pemerintah, pemerintahan kabupaten/kota dan provinsi)

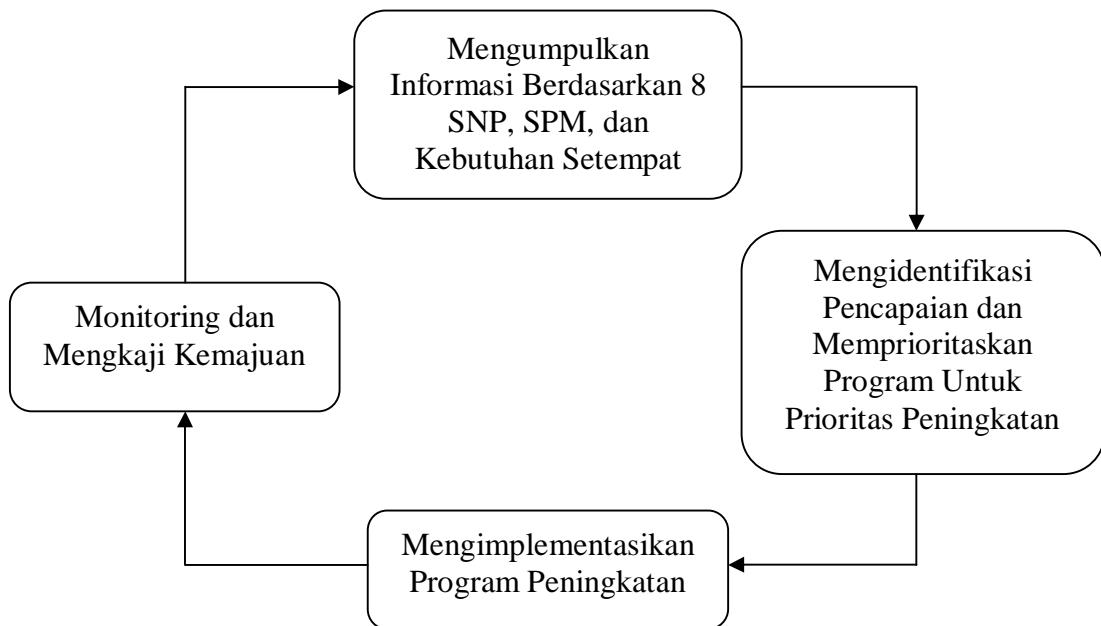
- 1) Menyediakan data dan informasi yang penting untuk perencanaan, pembuatan keputusan, dan perencanaan anggaran pendidikan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
- 2) Mengidentifikasi bidang prioritas untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan.
- 3) Mengidentifikasi jenis dukungan yang dibutuhkan terhadap sekolah.
- 4) Mengidentifikasi pelatihan serta kebutuhan program pengembangan lainnya.

- 5) Mengidentifikasikan keberhasilan sekolah berdasarkan berbagai indikator pencapaian sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan.

#### **4. Strategi Pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah**

Selama berjalannya proses EDS, diharapkan dapat dibangun adanya visi yang jelas mengenai apa yang diinginkan oleh para pemangku kepentingan terhadap sekolah mereka. Untuk dapat membangun visi bersama mengenai mutu ini yang harus dilakukan adalah semua pemangku kepentingan harus terlibat dalam proses untuk menyepakati nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang akan ditetapkan. Visi bersama ini akan membawa arah pengembangan sekolah ke depan dengan lebih jelas.

Sekolah mengukur dampak dari berbagai kegiatan terkait dengan peserta didik dan kegiatan pembelajaran. Setiap tahun sekolah juga memeriksa hasil dan dampak dari kegiatan belajar mengajar serta bagaimana sekolah dapat memenuhi kebutuhan peserta didiknya. Hal yang sangat penting dalam proses ini adalah sekolah harus mempergunakan evaluasi ini untuk memprioritaskan bidang yang memerlukan peningkatan dan mempersiapkan rencana pengembangan/peningkatan sekolah. Proses ini kemudian menjadi bagian dari siklus pengembangan dan peningkatan yang berkelanjutan.



*Sumber : Panduan Teknis Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah*

Gambar 5. Siklus Pengembangan & Peningkatan Berkelanjutan

Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sekolah (kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, komite sekolah, anggota masyarakat, dan pengawas sekolah) diharapkan bahwa tujuan dan nilai yang diinginkan dalam proses EDS menjadi bagian dari etos kerja sekolah. Perlu diingat adalah bahwa informasi yang didapatkan harus dianggap penting dan tidak lagi dianggap sebagai beban atau hanya sekedar sebagai daftar data yang perlu dikumpulkan karena diminta oleh pihak luar.

Proses EDS harus menjadi suatu refleksi untuk mengubah dan memperbaiki tata kerja agar menciptakan pelayanan pendidikan yang berkualitas sehingga hasilnya dapat berdampak bagi para peserta didik. Harapannya sekolah akan menjadi pelaku utama dalam peningkatan dan memberikan penjaminan terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu.

Tahapan-tahapan berikut adalah upaya yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan EDS, yakni:

a. Persiapan

Sebelum proses ini dapat dimulai, dibutuhkan pelatihan EDS secara berkelanjutan. Pelatihan ditujukan untuk mempersiapkan sekolah melaksanakan evaluasi secara transparan, untuk menjamin validitas dan mempergunakan informasi yang dikumpulkan untuk memberikan masukan terhadap perencanaan pengembangan sekolah. Pelatihan ini dilaksanakan dengan mempergunakan sistem berikut ini:

- 1) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dilatih sebagai pelatih (*Trainers of Trainers/Tot*). LPMP bersama dengan Dinas Pendidikan berfungsi sebagai pengelola program EDS.
- 2) Beberapa pengawas dilatih oleh LPMP agar menjadi koordinator pelaksanaan EDS.
- 3) Pengawas ditunjuk untuk mengontrol EDS dan melatih tim pengembang sekolah di beberapa sekolah.

b. Melaksanakan Proses Evaluasi Diri Sekolah

Setelah pelaksanaan pelatihan, kepala sekolah dengan dukungan pengawas sekolah melaksanakan EDS bersama dengan perwakilan guru, komite sekolah, orang tua, dan perwakilan lain dari kelompok masyarakat yang memang dipandang layak untuk

diikutsertakan. Tim ini akan mempergunakan instrumen yang disediakan untuk menetapkan profil kinerja sekolah berdasarkan indikator pencapaian. Informasi yang didapatkan kemudian dianalisa dan dipergunakan untuk mengidentifikasi kelebihan dan bidang perbaikan yang dibutuhkan, serta merencanakan program tahunan sekolah.

Pengawas sekolah harus dilibatkan secara penuh untuk mendukung sekolah dalam proses EDS, termasuk dalam mengimplementasikan rencana perbaikan dan pengembangan sekolah. Keterlibatan pengawas sekolah juga akan mendorong terciptanya transparansi dan keandalan data yang dikumpulkan, serta membantu sekolah untuk melangkah maju dalam program perbaikan berkelanjutan. Pengawas sekolah dan kepala sekolah akan menjadi pemain inti dalam pelibatan pemangku kepentingan untuk mendapatkan gambaran yang realistik mengenai sekolah dalam melakukan perbaikan, dan bukan hanya sekedar mengisi data yang menunjukkan pencapaian standar.

Instrumen EDS didasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang merefleksikan aspek-aspek yang penting bagi sekolah yang diperlukan untuk merencanakan perbaikan sekolah. Sekolah diharapkan melaksanakan program EDS sesuai dengan prosedur dan tidak memandangnya hanya sekedar sebagai kegiatan pengisian

instrumen. Sekolah harus mendeskripsikan situasi nyata yang ada di sekolah dan harus mampu menunjukkan adanya perbaikan ketika proses EDS diulang.

Instrumen EDS terdiri dari 8 Standar Nasional Pendidikan yang dijabarkan ke dalam 26 komponen dan 62 indikator. Setiap standar terdiri atas sejumlah komponen yang mengacu pada masing-masing Standar Nasional Pendidikan sebagai dasar bagi sekolah dalam memperoleh informasi kinerjanya yang bersifat kualitatif. Setiap komponen terdiri dari beberapa indikator yang memberikan gambaran lebih menyeluruh dari komponen yang dimaksudkan.

#### **D. Penelitian yang Relevan**

Ada beberapa hasil penelitian yang relevan dan telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Idha Ayu D.M. (2011) Universitas Negeri Yogyakarta, dengan judul “Implementasi Program Akselerasi Di SMP Negeri 1 Klaten” (skripsi). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMP Negeri 1 Klaten telah menerapkan Implementasi Program Akselerasi dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dari semua proses pembelajaran telah dijalankan secara maksimal. Dalam perencanaan, dilakukan perekrutan siswa, dan guru membuat perangkat pembelajaran

khusus program akselerasi. Dalam pengorganisasian dilakukan penyediaan guru yang berkompeten, guru dibentuk pengurus khusus program akselerasi, kurikulum yang disusun berdiferensiasi, strategi *active learning*, serta penyediaan sarana dan prasarana secara relevan. Dalam pergerakan siswa diberikan modul, metode penugasan, modul ceramah, diskusi, serta penggunaan sarana prasarana oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran yang maksimal. Sedangkan dalam proses pengawasan pembelajaran dilakukan dengan bentuk ulangan harian, ulangan semester dan ujian nasional, hanya saja waktu pelaksanaan lebih cepat. Di sisi lain dalam pelaksanaan program akselerasi ini banyak faktor yang menjadi pendukung dan penghambat. Pendukungnya adalah *input* (siswa) yang bagus, guru yang berkompeten, sarana dan prasarana yang memadai, serta dukungan penuh dari sekolah maupun masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sikap anak akselerasi yang egois, keadaan stress, proses penyesuaian diri, kesulitan materi, dan kondisi fisik yang lemah, serta biaya program akselerasi yang besar.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anik Ghufron, dkk (2009) Lembaga Penelitian UNY dengan judul “Pengembangan Standar Pelayanan Minimal Sebagai Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah Di Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) Secara umum, pemahaman terhadap 8 Standar Nasional Pendidikan pada jenjang SD, SMP, dan SMA sudah memadai yang ditandai dengan perolehan skor di atas 60%. Sementara itu tingkat penerapan 8 Standar Nasional Pendidikan

menunjukkan skor disekitaran 60%. (b) Apabila dilihat dari status sekolah (RSBI, SSN, dan Pra SSN) menunjukkan bahwa ada kecenderungan sekolah RSBI lebih baik dibanding dengan SSN dan Pra SSN. Namun demikian, dalam beberapa penerapan Standar Nasional Pendidikan (misalnya penerapan standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMP) sekolah RSBI tidak selalu lebih baik dari SSN, meskipun masih lebih baik dari sekolah pra SSN.

Mencermati kedua hasil penelitian relevan di atas, ada beberapa perbedaan dengan penelitian ini yakni dari fokus permasalahan yang diteliti, waktu penelitian dan subyek penelitian yang menjadi informan dalam proses pengumpulan data. Namun kedua penelitian di atas dapat digunakan sebagai alat bantu untuk membantu penyusunan penelitian karena beberapa poin yang ada di dalam penelitian tersebut dapat diterapkan pada penelitian saat ini.

## **E. Definisi Konseptual**

Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran maupun persepsi atas judul proposal skripsi, maka ada istilah yang sekiranya perlu penegasan dan pembatasan lebih lanjut, diantaranya sebagai berikut:

1. Program Evaluasi Diri Sekolah (EDS) adalah proses evaluasi yang bersifat internal yang melibatkan pemangku kepentingan untuk melihat kinerja sekolah berdasarkan SPM dan SNP yang hasilnya digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS).

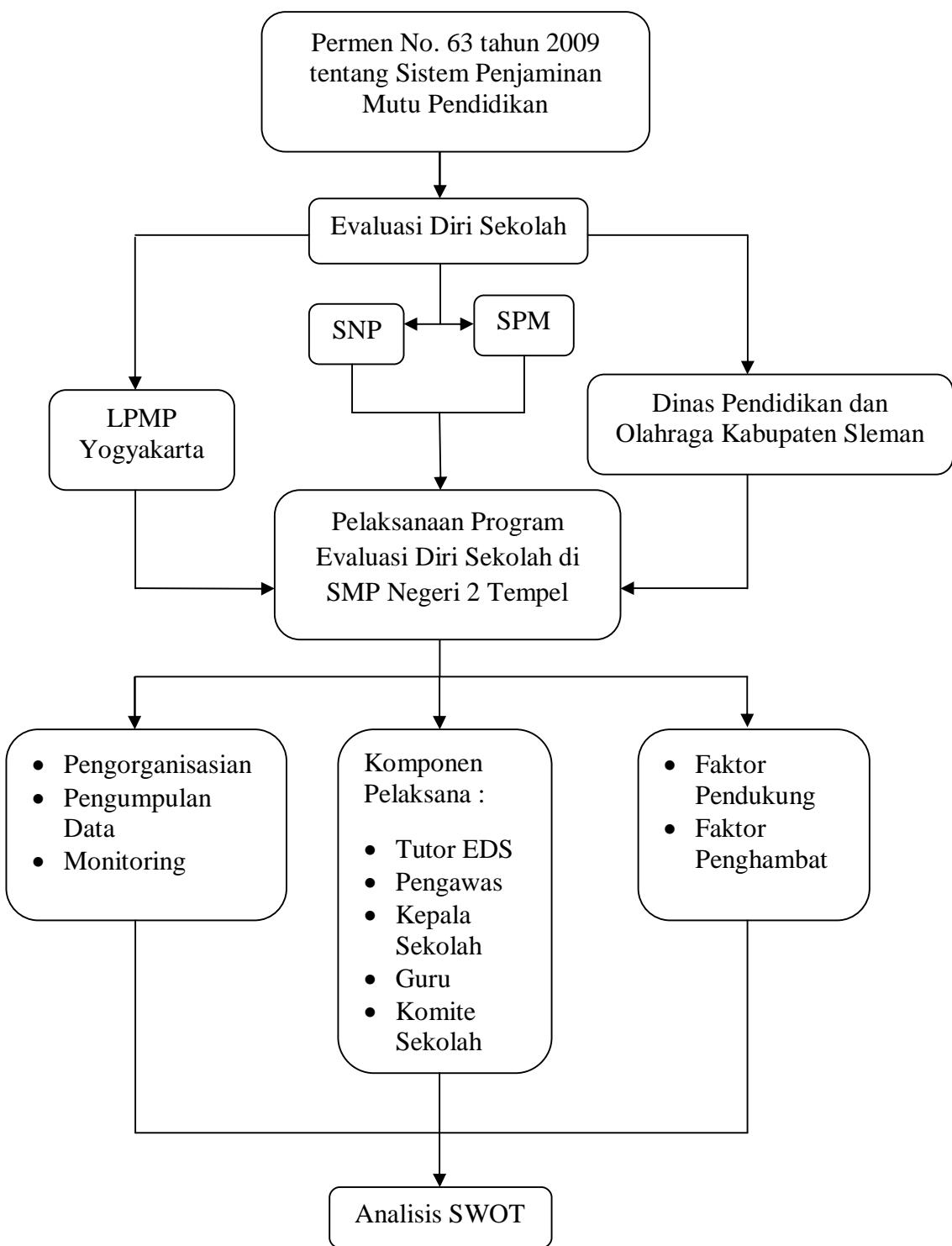
## **F. Kerangka Berpikir**

Program Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dilatarbelakangi dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). Sistem Penjaminan Mutu merupakan salah satu kebijakan dari Departemen Pendidikan Nasional yang dikeluarkan dalam upaya peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan. SPMP membutuhkan data terkait dengan kondisi sebenarnya sekolah yang digunakan untuk pemetaan sekolah. Untuk itu, sekolah diminta mengevaluasi diri mereka sendiri dengan mengacu pada komponen dari Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Penyelenggara sekaligus pengelola program EDS di Kabupaten Sleman yaitu Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Sleman yang dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Yogyakarta. Keduanya bekerja sama dalam rangka mensosialisasikan program EDS ke sekolah-sekolah termasuk di SMP Negeri 2 Tempel. Sosialisasi dilakukan oleh tutor yang berasal dari LPMP sebagai pendamping sekolah ketika pelatihan. Pelaksanaan program EDS di SMP Negeri 2 Tempel melibatkan komponen sekolah seperti kepala sekolah, guru, komite sekolah, orang tua, masyarakat dan juga pengawas sekolah. Setiap komponen memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Peran orang tua dan masyarakat menjadi satu dan tergabung ke dalam komite sekolah.

Pelaksanaan program EDS di SMP Negeri 2 Tempel terbagi atas pengorganisasian, pengumpulan data, dan monitoring. Program EDS menjadi

program tahunan sekolah. Setiap komponen berhubungan dan saling terkait karena tujuan akhir yang diharapkan yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Dari hasil EDS kemudian dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang, sekaligus tantangan sekolah. Data tersebut dapat digunakan sekolah sebagai bahan dalam menentukan prioritas untuk pembuatan rencana pengembangan sekolah di tahun pelajaran berikutnya. Penjelasan akan kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



## **G. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan konsep dan kerangka berpikir di atas, muncul beberapa pertanyaan sebagai dasar dan bahan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program EDS. Adapun pertanyaan penelitian tersebut yaitu :

1. Apakah unit pelaksana teknis telah disiapkan ?
2. Apakah pelaksana program EDS telah mengerti akan tujuan dan sasaran kebijakan ?
3. Apakah aktor-aktor utama telah ditetapkan dan siap menerima tanggung jawab pelaksanaan program EDS ?
4. Apakah koordinasi pelaksanaan telah dilakukan dengan baik ?
5. Bagaimana pengorganisasian dalam pelaksanaan program EDS ? Apakah peran dari masing-masing aktor/komponen pelaksana telah dipahami dan dilaksanakan dengan baik ?
6. Bagaimana proses pengumpulan data dalam pelaksanaan program EDS ?
7. Bagaimana monitoring dalam pelaksanaan program EDS ?
8. Apakah kriteria penilaian keberhasilan pelaksanaan program EDS telah ada, jelas, dan diterapkan dengan baik ?
9. Apa saja kelebihan dan kelemahan yang dimiliki SMP Negeri 2 Tempel ?
10. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program EDS ?